

ANALISA KELAYAKAN AREA PEMUKIMAN BARU KORBAN TSUNAMI SEBAGAI EVALUASI SETELAH 14 TAHUN BENCANA TSUNAMI DI BANDA ACEH (STUDI KASUS FRIENDSHIP VILLAGE of INDONESIA-CHINA ACEH BESAR)

Armia, ST., MMSc

Address: Jln. Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh –
Indonesia, email: armia.nasri@uui.ac.id, cellphone: +6282232133361

ABSTRACT

Setelah empat belas tahun upaya proses dari relokasi korban tsunami ke pemukiman baru, penting untuk memeriksa hasil pemulihan bencana di masyarakat yang terkena dampak. Menurut warga di daerah yang terkena dampak di Banda Aceh, komunitas ini pulih pada tingkat yang berbeda, dan beberapa komunitas belum kembali kondisi hidup pra-bencana mereka. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa tugas pemulihan bencana telah selesai, masih banyak aspek hasil harus dievaluasi. Misalnya, ada orang-orang di komunitas masih tidak memiliki akses ke air bersih, infrastruktur, dan tidak mendapatkan mata pencaharian. Hal ini penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh area relokasi pemukiman baru bagi masyarakat yang menjadi korban tsunami untuk keberkelanjutan dan kualitas kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Dari titik itu, itulah sebabnya evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dari hasil akhir setelah bencana sembilan tahun tsunami ada di Banda Aceh. pemerintah harus tahu situasi saat masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dari komunitas ini..

Kata kunci : Bencana, Gempa Tsunami, Pemukiman, Banda Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

After a fourteen year effort process from relocating tsunami victims to new settlements, it is important to examine the results of disaster recovery in affected communities. According to residents in the affected areas in Banda Aceh, these communities are recovering at different rates, and some communities have not returned to their pre-disaster living conditions. Even though the government claims that the disaster recovery task has

been completed, there are still many aspects of the results to be evaluated. For example, there are people in the community who still do not have access to clean water, infrastructure, and do not get a livelihood. It is important to know to what extent the relocation area of new settlements affects the people who are victims of the tsunami for the sustainability and quality of their lives in the future. From that point, that is why an evaluation is needed to improve for a better quality of the final result after the nine years tsunami disaster in Banda Aceh. the government must know the current situation of the people, so that they can take action to improve the quality of life of citizens and to ensure the sustainable development of these communities.

Keywords: *Disaster, Tsunami Earthquake, Settlement, Banda Aceh, Indonesia.*

1. Pemulihan Terhadap Bencana

Untuk memaparkan definisi dari proses pemulihan setelah bencana atau tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, hampir dari semua scholar mendefinisikan proses dari rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana adalah sebuah proses pemulihan yang memfokuskan untuk menngrestorasi dan dengan upaya besar untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan seperti sebelumnya. Hal yang paling penting dalam proses pemulihan bencana harus bisa membawa hasil untuk kembali seperti situasi sebelumnya bahkan lebih baik. Termasuk tindakan pra-bencana seperti perencanaan ulang, bentuk fisik untuk mengembalikan kondisi sebelumnya setelah bencana dan memastikan dari hasil akhir bisa membuat kehidupan masyarakat terus bisa berlanjut untuk masa yang akan datang. Ada banyak cara untuk mendefinisikan makna pemulihan bencana. Emmer (2009) berpendapat beberapa penulis melihat pemulihan bencana sebagai tantangan alam untuk memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Lindell (2003) pemulihan bencana memiliki tiga arti yang berbeda namun saling terkait:

"Pertama, itu adalah tujuan yang melibatkan pemulihan kegiatan masyarakat normal yang disebabkan oleh dampak bencana. Kedua, sebuah fase dalam siklus manajemen darurat yang dimulai dengan stabilisasi kondisi bencana (akhir dari fase tanggap darurat) dan berakhir ketika masyarakat telah kembali ke rutinitas normal. Ketiga, itu adalah sebuah proses dan upaya sehingga masyarakat bisa kembali ke rutinitas normal. Proses pemulihan melibatkan kedua fase dari sebelum bencana terjadi dan sesudah bencana dan dampak dari setelah bencana tersebut.

Dengan demikian, definisi alternatif pemulihan bencana adalah salah satu yang menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dan dampak bencana pada konstruksi manusia (yaitu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, pemerintah, dan ekonomi) serta deskripsi tentang bagaimana alam sistem dipengaruhi dan "sembuh" dari

bencana. Oleh karena itu disarankan agar pemulihan bencana dapat didefinisikan sebagai proses membangun kembali, memulihkan dan memperbaiki fisik, sosial, dan ekonomi serta lingkungan dalam proses perencanaan pra-acara dan pasca-event tindakan (Smith & Wenger, 2007:237). Akibatnya, orang, kelompok, organisasi, masyarakat, pemerintah, ekonomi, dan lingkungan sering pulih pada tingkat yang berbeda, dan dalam beberapa kasus gagal untuk mencapai kondisi pra-bencana mereka. Sebaliknya, peluang ada untuk memulihkan dengan cara hasil tersebut di dikenali (sosial, ekonomi, dan lingkungan) perbaikan atas kondisi-kondisi yang lazim sebelum acara.

2. Menciptakan Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat yang Berkelanjutan setelah Bencana

Definisi "masyarakat yang berkelanjutan" dapat dibahas sebagai dua istilah terpisah, berdasarkan dari dua kata berkelanjutan dan masyarakat. Keberlanjutan adalah kemampuan atau kapasitas untuk menjaga sesuatu yang terjadi, atau keadaan yang tahan lama, dan mampu bertahan dari waktu ke waktu (Eadie et al, 2001: 10). Buku "Holistik Disaster Recovery 2001" telah menyarankan bahwa definisi keberlanjutan "konsep merangkul yang dapat memberikan sebuah kerangka untuk melakukan banyak hal ke depan, baik itu untuk perbaikan gaya hidup, keselamatan, peluang ekonomi atau melindungi lingkungan "(Eadie et al, 2001: 9)..

Sudut pandang ini mendeskripsikan sebuah keberlanjutan yang meliputi semua hal dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Ini adalah tentang meningkatkan di semua aspek untuk meningkatkan keberlanjutan. Hal ini tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga bagi lingkungan.

Roseland (2000) mencatat sebuah komunitas yang berkelanjutan adalah "sebuah komunitas yang menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini sambil memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk generasi mendatang. Sebuah komunitas yang berkelanjutan berupaya kualitas hidup yang lebih baik untuk semua penghuninya sambil mempertahankan kemampuan alam untuk berfungsi dari waktu ke waktu dengan meminimalkan limbah, mencegah polusi, mempromosikan efisiensi dan mengembangkan sumber daya lokal untuk merevitalisasi ekonomi lokal "(hal. 99). Dengan definisi ini, masyarakat yang berkelanjutan mengacu membuat hidup berkelanjutan bagi

masyarakat dengan mencari dan mendukung untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Dalam konteks masyarakat, keberlanjutan berkembang dari generasi ke generasi karena kehendak sosial berubah selama periode waktu. Dalam buku "Holistic Disaster Recovery 2001" menunjukkan ada tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yaitu, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam buku 'pemulihan bencana holistik "Eadie dan rekan-rekannya juga menunjukkan mengapa berkelanjutan merupakan konsep penting dalam pemulihan bencana (2001: 1-5):

- Keberlanjutan adalah proses pendekatan untuk melihat ke depan, dimana manusia sebagai penghubung langsung untuk perubahan yang berhubungan dengan, peningkatan perekonomian global, sifat lingkungan global, dan yang berhubung langsung dalam jangkauan jaringan komunikasi.
- Sebuah hal yang memberikan kontrol balik kepada masyarakat itu sendiri, dan sebuah keberlanjutan yang mengarah untuk perubahan situasi ataupun keadaan kearah yang lebih baik.
- Prinsip-prinsip dari keberlanjutan yang membantu perilaku global terhadap satu sama lain, terhadap lingkungan dan juga untuk masa yang akan datang.
- Menggunakan sistem pendekatan keberlanjutan dapat membantu masyarakat lebih mengenali dampak dari berbagai keputusan dalam merancang tujuan di masyarakat. Hal ini membantu memperjelas pemikiran dan prioritas yang tidak terelakkan.

3. Prinsip Komunitas Berkelanjutan Bangunan setelah Bencana

Yang paling penting sebelum merencanakan untuk keberlanjutan bagi masyarakat, perlu untuk mengenali dan memahami beberapa elemen kunci dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Standar cara membuat masyarakat menjadi berkelanjutan sedang mendekati dan lihat kunci elemen keberlanjutan. Kemudian mereka dapat melanjutkan hidup mereka seperti sebelumnya mereka lakukan, dengan kualitas hidup yang baik bahkan lebih baik.

Sebenarnya, pemulihan bencana membawa masyarakat-perubahan yang dapat menciptakan kesempatan untuk membangun kembali cara yang lebih baik. Dengan standar internasional dapat yang membawa tujuan besar untuk hasil terakhir dalam proses pemulihan bencana. Dan tujuan

bagaimana membuat masyarakat menjadi berkelanjutan; masyarakat perlu menjaga tumpang tindih dan integrasi yang sosial, lingkungan, dan bidang ekonomi. Setiap sphere atau sistem memiliki banyak komponen, dan dalam setiap komunitas kualitas, kuantitas, penting, dan keseimbangan dari mereka akan berbeda.

Membangun keberlanjutan tidak menuntut perencanaan atau pemulihan proses baru atau terpisah. Dalam buku *Holistik Disaster Recovery: (. Eadie et al, 2001)* Gagasan untuk Membangun Keberlanjutan lokal setelah Bencana Alam, berpendapat, melainkan memberikan fokus diperbesar untuk memeriksa kekhawatiran masyarakat abadi dalam terang situasi bencana yang dikenakan. Ada enam prinsip dalam bagaimana masyarakat menjadi berkelanjutan. Untuk menjadi berkelanjutan, masyarakat perlu menjaga tumpang tindih dan integrasi yang sosial, lingkungan, dan bidang ekonomi. Setiap sphere atau sistem memiliki banyak komponen, dan dalam setiap komunitas kualitas, kuantitas, penting, dan keseimbangan dari mereka akan berbeda.

Tapi kebanyakan orang setuju bahwa enam prinsip yang diuraikan dalam buku "pemulihan bencana holistik, 2001", proses pemulihan dapat merangkul semua aspek. Sebuah komunitas dapat menjadi lebih berkelanjutan melalui enam prinsip-prinsip keberlanjutan. Enam prinsip keberlanjutan yang dapat mengatasi untuk menjadi berkelanjutan bagi masyarakat adalah: (. P 1). Orang-orang dapat membangun kembali masyarakat yang lebih baik setelah bencana dengan melindungi atau meningkatkan kualitas lingkungan lokal mereka.

Secara keseluruhan menggabungkan konsep 'keberlanjutan' dalam pemulihan bencana – dan memang ke dalam semua aspek yang mungkin dari manajemen bahaya adalah langkah logis berikutnya dalam perkembangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses recovery (pemulihan) setelah bencana adalah proses yang rumit membutuhkan proses perencanaan yang baik dan strategi implementasi. Pemerintah sebagai pemimpin dalam proses ini harus menyediakan rencana yang baik untuk memandu proses pemulihan bencana. Pemerintah Indonesia melakukan proses pemulihan setelah tsunami 2004 dengan menatap proses perencanaan. Kualitas proses perencanaan dan isi rencana secara signifikan mempengaruhi hasil pemulihan.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa rencana pemulihan bencana pascatsunami dirancang dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan, hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan dan isi Rencana Induk tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pemulihan bencana berkelanjutan. Dalam hal proses perencanaan, penelitian ini membuat beberapa temuan kunci ;

Pertama, pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana pemulihan bencana sebelum bencana terjadi, dan hanya memiliki waktu singkat untuk menyiapkan rencana pemulihan setelah berbagai dampak bencana. Pemerintah juga hanya memiliki waktu terbatas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan penilaian kerusakan.

Kedua, berkenaan dengan pembiayaan upaya bantuan dan evaluasi kerusakan, pemerintah tidak cukup merencanakan bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan dana. Dalam perencanaannya, pemerintah memberikan prioritas anggaran untuk perumahan, pendidikan dan bantuan infrastruktur. Namun, dalam praktik yang sebenarnya, pemerintah tidak menghabiskan banyak anggaran untuk sektor-sektor tersebut sebagaimana disebut dalam Rencana Induk.

Ketiga, dalam hal keterlibatan organisasi dan masyarakat, pemerintah Indonesia tidak memiliki pengaturan yang diperlukan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di antara lembaga pusat dan daerah. Proses perencanaan strategis yang mengarah ke Master Plan tidak digunakan sebagai alat koordinasi untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, karena banyak dari pekerjaan ini terjadi di Jakarta dan tidak melibatkan lembaga yang sudah bekerja dengan masyarakat di lapangan, yang pada gilirannya tidak mendedikasikan sumber daya untuk proses dan karena itu memiliki penyebab berbeda dalam hal visi dan misi mereka. Selain itu, bukan hanya para pemangku kepentingan yang tidak terlibat langsung; komunitas itu sendiri juga tidak terwakili secara memadai. Perwakilan masyarakat tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka terpisah dari pemerintah.

Dalam hal isi Rencana Induk, hasil analisis menghasilkan beberapa temuan utama. Sementara konten Rencana Induk secara konseptual kuat dalam perumusan proses pemulihan, dalam situasi nyata sebagian besar diganti selama proses implementasi, dengan pemerintah tidak benar-benar menerapkan semua dari enam prinsip keberlanjutan.

KESIMPULAN

. Keefektifan hasil akhir dari proses pemulihan ini dalam hal keenam prinsip dianalisis, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Hidup: Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemerintah tidak meningkatkan fasilitas masyarakat (seperti perumahan, lingkungan, dan infrastruktur) sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga masyarakat masih membutuhkan dukungan substansial dari pemerintah untuk meningkatkan tempat tinggal baru mereka bahkan empat belas tahun setelah tsunami terjadi.

2. Vitalitas Ekonomi: Pemerintah tidak memiliki program jangka panjang untuk membantu masyarakat dalam hal membangun kembali bisnis dan mata pencaharian mereka, sehingga masyarakat masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan ekonomi mereka.

3. Kesetaraan sosial dan antargenerasi: Pemerintah tidak menunjukkan kepedulian yang memadai tentang anggota masyarakat yang berasal dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Dengan demikian, tindakan pemerintah cenderung menggeneralisasi masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik berbagai kelompok.

4. Kualitas Lingkungan: Pemerintah tidak memiliki program yang berkaitan dengan memastikan kualitas tempat tinggal baru di masyarakat, seperti area pejalan kaki dan taman untuk bersantai, atau program untuk memastikan bahwa sanitasi tetap terjaga.

5. Ketahanan Bencana: Pemerintah tidak menunjukkan perhatian yang cukup terkait prinsip ini. Meskipun mereka memiliki berbagai program pelatihan yang terkait dengan ketahanan bencana, mereka tidak membahas prinsip ini dalam hal infrastruktur di daerah-daerah yang terkena dampak kota, seperti dengan menyediakan rute pelarian dan cara menyelamatkan orang dari bangunan pada saat terjadinya gempa dan bencana alam lainnya.

6. Proses Partisipatif: Pemerintah tidak menerapkan prinsip ini sepenuhnya, karena masyarakat tidak cukup terwakili dalam proses pengambilan keputusan untuk pemilihan tempat dimana mereka akan di relokasi. Karena itu, aspirasi dan opini masyarakat yang sulit tidak memiliki peluang untuk diwujudkan dan dipertanggung jawabkan.

Akhirnya, belum ada evaluasi dari pemerintah mengenai hasil akhir dari proses pemulihan ini, yang berarti bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut telah diambil untuk memeriksa dan meningkatkan kualitas dalam hal hasil akhir. Namun evaluasi semacam itu penting, karena dapat berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah dalam hal membangun proses pemulihan bencana yang berkelanjutan untuk tantangan di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

Bridger, J.C., Luloff A.E. (1999). *Toward an International Approach to Sustainable Community Development*. In *Journal of Rural Studies* ed. 15, USA: Pergamon Published

Boyce, C., & Neale, P. (2006). *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input* (pp. 3-7). Watertown, MA: Pathfinder International.

D, Milleti, (1999). *Disaster by Design*. Washington, DC: Henry Press

Eadie, C., Emmer, R.E., Michaels, S., Monday, J., Philipsborn, C., Philips, B.D., Salvesen, D. (2001). *Holistic Disaster Recovery: Ideas for Building Local Sustainability after a Natural Disaster*. Colorado, USA: PERI

Goodland, R. (1995). *The Concept of Environmental Sustainability*, in *journal Annual Review of Ecology and Systematics* vol.26, USA: Annual Reviews.

<http://english.cri.cn>. November,05 (2007). (Aceh Tsunami Victims Moving into Friendship Village), retrieved from <http://english.cri.cn/4026/2007/11/05/1361@291133.htm>

Lindell, K.M. (2013). *Recovery And Reconstruction After Disaster*. In Bobrowsky, P.T (Ed.), *Encyclopedia of Natural Hazard* (pp. 812-824). Netherlands, ND: Springer Netherlands

McEntire, D.A. (2007). *Disaster Response And Recovery*. USA:Wiley

Bailey, K. (1994). *Methods of Social Research*, Fourth Edition. New York: The Free Press.

Barenskin, J.E.D., and Leeman, E. (2013). *Post-Disaster Reconstruction and Change: Communities' Perspectives*. USA: Taylor & Francis Group.LLC.

Carpenter, B. (2009). *Restructuring Local Government*, New York: Cornell University-Journal, Ithaca Published.

Eadie, C., Emmer, R.E., Michaels, S., Monday, J., Philipsborn, C., Philips, B.D., & Salvesen, D. (2001). *Holistic Disaster Recovery: Ideas for Building Local Sustainability after a Natural Disaster*. Colorado: PERI

Philips, B.D. (2009). *Disaster Recovery*. New York, NY: CRC Press

Piercy, K. W. *Analysis of Semi-Structured Interview Data*. Utah State University, USA.

Roseland, M. (2000). *Sustainable Community Development: Integrating environmental, economic, and social objectives*. USA: Pergamon Published

Smith, G. P., Wenger, D. (2007). *Sustainable Disaster Recovery: Operationalizing An Existing Agenda*. In Rodríguez, H., Kennedy, P. J., Quarantelli, E. L., Ressler, E., & Dynes, R. (Ed.). *Handbook of disaster research* (pp. 234-257). New York, NY: Springer

Tongco, M. D. C. (2007). *Purposive sampling as a tool for informant selection*. *A journal of Plants, People, and Applied Research*(pp. 147 - 158). Texas, USA: Ethnobotany Research & Application Publis

